KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Banyak Daerah lepas tangan
Tanggal : Rabu, 25 September 2024
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 2

SYAIFUL HUDA
Ketua Komisi X DPR

Banyak Daerah Lepas Tangan

PERPUSTAKAAN DPR-RI

“

Saat ini, Indonesia memang darurat bullying. Makanya, harus ada *reward and punishment* dalam mengurangi angka perundungan ini.



Tingkat bullying di lembaga pendidikan cukup tinggi. Untuk mengatasinya, Anda mengusulkan pemotongan anggaran bagi daerah yang angka perundungannya tinggi. Tolong jelaskan...

Saat ini, Indonesia memang darurat bullying. Makanya, harus ada *reward and punishment* dalam mengurangi angka perundungan ini.

Siapa yang berprestasi, harus dikasih penghormatan. Siapa yang tidak berprestasi, harus dikasih punishment. Nah, salah satunya melalui pemotongan anggaran.

Caranya?

Kalau ada daerah yang tingkat bullyingnya tinggi, ada punishment dengan mengurangi dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)-nya. TKDD pada konteks pendidikan. Kalau terjadi banyak bully di level pendidikan, TKDD dulu yang dikurangi.

Berapa pengurangannya?

Terkait berapa potongannya, nanti Kemenkeu dan Kemendagri yang bisa menghitungnya.

Kenapa anggaran daerah harus dipotong jika terjadi banyak bully?

Supaya semua bekerja dengan sungguh-sungguh, dan darurat bullying ini bisa kita kurangi. Saat ini, banyak daerah yang lepas tangan dan lebih menyalahkan pihak sekolah.

Selain pemotongan anggaran, langkah apa lagi yang bisa dilakukan?

Hukum harus ditegakkan. Siapa pun yang terlibat, apakah anak pejabat, orang biasa, harus diperlakukan sama. Jangan sampai kasus bully hilang gara-gara si pelakunya anak pejabat dan seterusnya.

Apa lagi yang perlu dilakukan?

Perlu ada Satgas. Kita berharap Satgas itu concern untuk betul-betul dari hari ke hari melakukan proses pengawasan, dan dibikin manajemennya dengan baik.

Pengawasannya itu mudah kok, karena pola tindak bullying ini tidak dilakukan oleh orang per orang, tapi dilakukan secara berkelompok. ■ REN